

ANALISIS FENOMENA “INDONESIA GELAP” DALAM PERSPEKTIF DINAMIKA KONSTITUSIONAL DAN SOSIAL POLITIK MAHASISWA FKIP UNIVERSITAS JEMBER

Anis Humairoh¹, Ratna Endang Widuatie², Mega Rohmah Deviyati³, Eka Nurfadilah⁴, Raras Azzahra Pury⁵, Revania Dwi Putri Julianti⁶

Universitas Negeri Jember

220210101055@unej.ac.id¹, ratnaendang.sastra@unej.ac.id², 220910202060@unej.ac.id³,
240210101023@unej.ac.id⁴, 250210303042@unej.ac.id⁵, 250210204189@unej.ac.id⁶

Abstrak

Fenomena “Indonesia Gelap” muncul di media sosial sebagai bentuk ekspresi publik terhadap kondisi sosial dan politik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana mahasiswa FKIP Universitas Jember memaknai fenomena tersebut melalui perspektif dinamika konstitusional dan sosial politik. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan survei terhadap 60 mahasiswa melalui angket skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 97% mahasiswa setuju bahwa “Indonesia Gelap” mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara nilai konstitusi dan realitas kebijakan publik. Mereka menilai media sosial berperan penting dalam menyuarakan kritik dan membentuk opini publik. Sebagai calon pendidik dan agen perubahan, mahasiswa memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan literasi konstitusi, memperkuat kesadaran politik, serta menggunakan pendidikan sebagai sarana menanggulangi ketimpangan pengetahuan dan degradasi moral. Dengan demikian, fenomena “Indonesia Gelap” dipandang mahasiswa bukan hanya sebagai kritik, tetapi sebagai momentum untuk mengoptimalkan peran mereka dalam mendorong nilai demokrasi, keadilan, dan transparansi di masyarakat.

Kata kunci: Indonesia Gelap; dinamika konstitusional; gerakan sosial-politik; mahasiswa FKIP; kesadaran demokrasi.

Abstract

The “Indonesia Gelap” phenomenon emerged on social media as a form of public expression regarding the social and political conditions in Indonesia. This study aims to analyze how students at the FKIP University of Jember interpret this phenomenon through the lens of constitutional and socio-political dynamics. The research employs a quantitative descriptive method, using a Likert scale questionnaire to survey 60 students. The results show that 97% of students agree that “Dark Indonesia” reflects a discrepancy between constitutional values and public policy reality. Students consider social media to be an important platform for voicing criticism and shaping public opinion. As future educators and agents of change, they understand their moral responsibility to improve constitutional literacy, strengthen political awareness, and use education to overcome knowledge inequality and moral degradation. Thus, students view the “Indonesia Gelap” phenomenon not only as criticism but also as an opportunity to optimize their role in promoting democratic values, justice, and transparency in society.

Keywords: Indonesia Gelap, constitutional dynamics, socio-political movements, FKIP students, and democratic awareness.

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Fenomena “Indonesia Gelap” pertama kali muncul di media sosial pada awal Februari 2025 dan dengan cepat menjadi sorotan publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar dalam penyebaran berita serta menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan keresahan terhadap kondisi sosial dan politik. Gerakan ini tidak hanya terjadi di ranah digital, tetapi juga memobilisasi massa di berbagai kota, sehingga menjelma menjadi peristiwa politik yang signifikan untuk dianalisis dari perspektif konstitusional dan dinamika sosial-politik kampus (Ardiyanto & Melisa, 2025; Moderasi Journal, 2025). Tagar #IndonesiaGelap mencerminkan ketidakpuasan dan kegelisahan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pada periode kepemimpinan saat ini. Secara substantif, gerakan “Indonesia Gelap” mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi sosial dan politik yang dianggap belum mampu menegakkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat (Juditha, 2025). Polarisasi opini publik yang tajam di media sosial menjadi indikasi meningkatnya sentimen negatif terhadap kondisi bangsa. Fabela (2024) menambahkan bahwa kesenjangan sosial dan ketimpangan akses terhadap pendidikan dan ekonomi menjadi pemicu utama munculnya rasa ketidakadilan di masyarakat. Dalam konteks ini, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial dan politik.

Raharjo dan Santoso (2023) menegaskan bahwa partisipasi politik mahasiswa di era digital telah mengalami transformasi signifikan, di mana media sosial menjadi sarana utama dalam menyuarakan aspirasi, membangun kesadaran kritis, dan mengorganisir gerakan sosial. Dari sisi konstitusional, gerakan ini menyoroti pentingnya pemahaman terhadap hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat, berekspresi, dan memperoleh pendidikan. Namun, dalam praktiknya, norma-norma konstitusional sering kali digunakan oleh aktor negara sebagai legitimasi kebijakan yang justru menimbulkan ketimpangan (Makmur, 2024; Rasya & Triadi, 2024). Hal ini memperkuat persepsi adanya “kegelapan” dalam sistem hukum dan pemerintahan yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat. Murtadho (2024) juga mengungkapkan bahwa pergeseran pemahaman terhadap konstitusionalisme di Indonesia berpotensi melemahkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas publik. Dalam perspektif sosial-politik kampus, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jember memiliki posisi strategis sebagai bagian dari komunitas intelektual muda yang berperan aktif dalam membentuk identitas politik generasi penerus bangsa. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai pelaku yang berkontribusi melalui aksi nyata di ruang publik maupun digital.

Menurut Sugiyono (2022), pendidikan harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan perubahan sosial, sehingga lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab moral untuk menumbuhkan kesadaran kritis, empati sosial, dan nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, mahasiswa FKIP Universitas Jember diharapkan mampu menjadi agen penerang di tengah “kegelapan” sosial dan politik yang melanda Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bagaimana narasi “Indonesia Gelap” terbentuk dan dipahami oleh mahasiswa FKIP Universitas Jember; (2) menelaah implikasinya terhadap pemahaman hak-hak konstitusional dan praktik demokrasi kampus; serta (3) mengevaluasi strategi mobilisasi online dan offline yang digunakan mahasiswa dan aktor terkait. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam kajian dinamika sosial-politik mahasiswa dan memperkaya literatur tentang konstitusionalisme di era pasca kebijakan besar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis persepsi mahasiswa terhadap fenomena “Indonesia Gelap” dalam konteks dinamika konstitusional dan sosial-politik. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan gambaran objektif mengenai persepsi, sikap, serta tingkat partisipasi mahasiswa

terhadap isu-isu demokrasi, kebebasan berekspresi, dan legitimasi pemerintah (Sugiyono, 2022; Raharjo & Santoso, 2023). Penelitian dilaksanakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jember dengan populasi seluruh mahasiswa aktif pada tahun akademik 2024/2025. Populasi ini dipilih karena mahasiswa FKIP dianggap memiliki kesadaran sosial dan politik yang khas, mengingat mereka adalah calon pendidik yang sekaligus bagian dari komunitas intelektual kampus. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Fadli dan Astuti (2021) bahwa mahasiswa kependidikan memiliki kecenderungan berpikir kritis terhadap kebijakan publik dan isu-isu demokrasi kampus.

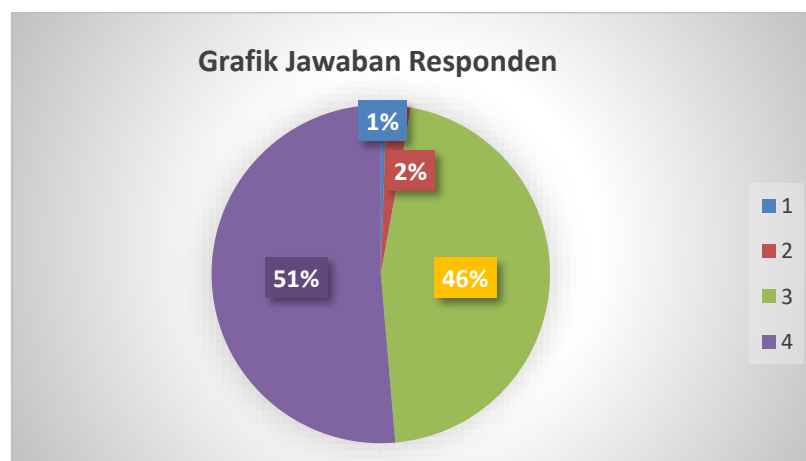
Sampel penelitian diambil menggunakan teknik proportional random sampling dengan jumlah 60 responden yang tersebar pada beberapa program studi di FKIP Universitas Jember agar hasil penelitian bersifat representatif. Jumlah tersebut sesuai dengan pedoman ukuran sampel penelitian sosial menurut Roscoe (dalam Sekaran & Bougie, 2019) yang menyarankan rentang antara 30-500 responden. Data yang terkumpul dianalisis untuk melihat hubungan antara pemahaman konstitusi dan sikap sosial-politik mahasiswa. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang akurat tentang persepsi mahasiswa FKIP Universitas Jember terhadap fenomena “Indonesia Gelap” serta memperkaya kajian mengenai dinamika konstitusional dan sosial-politik mahasiswa di Indonesia.

HASIL KARYA DAN PEMBAHASAN

Dinamika Konstitusional: Kesenjangan antara Norma dan Realita Negara

Fenomena “Indonesia Gelap” menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusional yang termuat dalam UUD 1945 dengan praktik kebijakan pemerintah di lapangan. Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak atas pendidikan yang layak, sementara Pasal 33 menegaskan asas kekeluargaan dan gotong royong dalam perekonomian nasional. Namun demikian, kebijakan pengurangan dana pendidikan dan pengalokasian anggaran yang besar terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan ketidakseimbangan prioritas pembangunan (Makmur, 2024). Ketidaksesuaian tersebut mengakibatkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah (Moderasi, 2025). Menurut teori *relative deprivation*, situasi seperti ini menimbulkan perasaan kehilangan hak akibat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan sosial yang dialami masyarakat (Rasya & Triadi, 2024). Kritik mahasiswa terhadap program MBG dan revisi Undang-Undang Minerba mencerminkan pelemahan prinsip *checks and balances* antar lembaga negara serta rendahnya partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

Kondisi tersebut bertentangan dengan semangat kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi (Makmur, 2024; Studi Kritik terhadap Narasi Indonesia Gelap, 2025). Berikut merupakan diagram hasil kuesioner jawaban responden berkaitan dengan fenomena “Indonesia Gelap” :



Gambar1. Grafik Hasil Jawaban Responden

Berdasarkan grafik tersebut, yang dilakukan terhadap 60 responden mahasiswa FKIP Universitas Jember, diperoleh data bahwa 51% responden memilih skor 4 (sangat setuju) dan 46% memilih skor 3 (setuju) terhadap pernyataan yang menggambarkan adanya ketimpangan antara nilai konstitusi dan realitas kebijakan. Sementara itu, hanya 2% responden tidak setuju, dan 1% sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa (97%) memiliki kesadaran konstitusional yang tinggi dan peka terhadap penyimpangan prinsip-prinsip dasar negara dalam kebijakan publik. Temuan ini sejalan dengan teori *relative deprivation*, di mana ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan sosial menimbulkan rasa kehilangan hak dan memicu kritik publik (Rasya & Triadi, 2024). Mahasiswa memandang bahwa fenomena “Indonesia Gelap” merupakan bentuk respon terhadap berkurangnya fungsi *checks and balances* antar lembaga negara, serta lemahnya peran publik dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Kesadaran konstitusional yang tumbuh di kalangan mahasiswa FKIP sebagai bagian dari generasi Z terbentuk melalui keterpaparan informasi digital, pendidikan kewarganegaraan, serta pengalaman sosial di lingkungan kampus. Penamaan “Indonesia Gelap” menjadi simbol reflektif terhadap redupnya nilai-nilai konstitusi dalam praktik bernegara, bukan bentuk pesimisme terhadap masa depan bangsa.

Dinamika Sosial-Politik: Frustrasi Kolektif dan Gerakan Pemuda Digital

Fenomena “Indonesia Gelap” juga memperlihatkan transformasi partisipasi politik generasi muda di era digital. Mahasiswa kini lebih aktif menggunakan media sosial sebagai ruang ekspresi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah (Anggraeni, N, 2025). Tagar seperti #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu menjadi simbol perlawanan terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Berdasarkan hasil kuesioner, 97% mahasiswa (gabungan skor 3 dan 4) menyatakan bahwa mereka mendukung partisipasi politik melalui media digital sebagai bentuk kesadaran sosial dan tanggung jawab moral. Hanya sebagian kecil responden (3%) yang bersikap netral atau tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi sarana demokratis bagi mahasiswa dalam mengedukasi publik, menyampaikan aspirasi, serta membangun gerakan sosial yang damai dan berbasis data. Menurut teori *decremental deprivation*, frustrasi sosial muncul ketika kondisi sosial-ekonomi mengalami kemunduran yang tidak sejalan dengan harapan masyarakat (Fabela, 2024). Mahasiswa FKIP Universitas Jember menilai bahwa fenomena “Indonesia Gelap” adalah bentuk ekspresi moral terhadap ketidakadilan sosial dan lemahnya pemerataan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan.

Perspektif Mahasiswa FKIP Universitas Jember terhadap Fenomena “Indonesia Gelap”

Hasil kualitatif dari kuesioner terbuka menunjukkan bahwa mahasiswa FKIP memaknai istilah “Indonesia Gelap” bukan hanya sebagai kondisi fisik atau simbol politik, melainkan sebagai refleksi dari ketimpangan sosial, krisis moralitas, dan keterbelakangan pendidikan. Sebagian besar responden menyebutkan bahwa “kegelapan” di sini melambangkan minimnya transparansi pemerintah, rendahnya pemerataan akses pendidikan, serta menurunnya keadilan sosial di masyarakat. Sebagai calon pendidik, mahasiswa FKIP memahami bahwa peran mereka tidak hanya sebatas kritikus kebijakan, tetapi juga sebagai agen pencerahan yang mampu mengubah kondisi sosial melalui pendidikan. Mereka menekankan pentingnya penyampaian kritik secara sopan, berbasis data, dan disalurkan melalui jalur konstitusional, seperti forum akademik, publikasi ilmiah, maupun aksi damai. Nilai-nilai Pancasila tetap dijadikan dasar dalam setiap bentuk ekspresi publik, menandakan bahwa mahasiswa FKIP memiliki karakter demokratis yang konstruktif.

Peran Mahasiswa FKIP dalam Menjaga Demokrasi dan Keadilan Sosial

Mahasiswa FKIP Universitas Jember memandang diri mereka sebagai calon pendidik dan agen transformasi sosial. Mereka memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan integritas melalui pendidikan. Dalam konteks ini, mahasiswa tidak hanya bertugas sebagai pengkritik kebijakan, tetapi juga sebagai pendidik masyarakat yang menanamkan nilai toleransi, kesadaran politik, dan keadilan sosial kepada generasi muda.

Peran tersebut memperlihatkan keterkaitan antara tanggung jawab akademik dan sosial mahasiswa FKIP, di mana pendidikan dipahami sebagai instrumen utama untuk memperkuat partisipasi warga negara dan mengatasi ketimpangan sosial di Indonesia. Hubungan Dinamika Konstitusional dan Sosial-Politik dalam Fenomena “Indonesia Gelap”. Fenomena “Indonesia Gelap” mencerminkan interaksi erat antara dinamika konstitusional dan sosial-politik di Indonesia. Dari sudut pandang mahasiswa FKIP, fenomena ini memperlihatkan bagaimana ketidakseimbangan pelaksanaan konstitusi berimplikasi langsung terhadap kondisi sosial-politik masyarakat.

Konstitusi menjamin hak atas kebebasan berekspresi, keadilan sosial, dan pendidikan, tetapi lemahnya implementasi menyebabkan munculnya kekecewaan publik dan protes sosial. Dalam konteks kampus, mahasiswa berupaya menegakkan prinsip konstitusi melalui forum diskusi, penelitian, dan aksi damai. Konstitusi bagi mahasiswa bukan sekadar dokumen hukum, tetapi pedoman moral dalam menegakkan keadilan dan etika politik. Di sisi lain, dinamika sosial-politik tercermin dari meningkatnya partisipasi digital mahasiswa dan masyarakat dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan publik. Media sosial menjadi ruang demokratis di mana mahasiswa dapat mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak konstitusional dan prinsip keadilan. Interaksi antara kedua dinamika tersebut bersifat simbiotik: konstitusi memberikan landasan normatif bagi partisipasi sosial, sementara dinamika sosial-politik berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penyimpangan kekuasaan. Mahasiswa FKIP berperan penting dalam menjaga keseimbangan ini melalui pendidikan yang menanamkan kesadaran konstitusional, kepekaan sosial, dan integritas moral.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa FKIP Universitas Jember memahami fenomena “Indonesia Gelap” sebagai kritik sosial-politik yang konstruktif dan berbasis nilai konstitusi. Mereka menilai pentingnya penyampaian aspirasi yang sopan, faktual, dan sesuai hukum. Melalui pendidikan dan literasi politik, mahasiswa berkomitmen untuk menjaga demokrasi, memperkuat keadilan sosial, serta menjadi agen perubahan yang kritis dan berintegritas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan 60 mahasiswa FKIP Universitas Jember, dapat disimpulkan bahwa fenomena “Indonesia Gelap” dipahami mahasiswa sebagai bentuk kritik sosial-politik yang bersumber dari kegelisahan publik terhadap ketimpangan sosial, lemahnya pemerataan pendidikan, serta menurunnya kualitas keadilan sosial di Indonesia. Sebanyak 97% responden menunjukkan sikap setuju dan sangat setuju bahwa fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai konstitusi dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam kehidupan nyata. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa FKIP memiliki tingkat kesadaran konstitusional yang tinggi, serta kemampuan analitis dalam menilai dinamika kebijakan publik melalui perspektif hak-hak dasar warga negara. Selain itu, mahasiswa memandang bahwa media sosial berperan penting sebagai ruang demokratis dalam menyuarakan aspirasi, menyebarluaskan informasi, dan mendorong terbentuknya opini publik yang kritis. Fenomena “Indonesia Gelap” bagi mahasiswa bukan sekadar bentuk protes, melainkan sarana untuk memperkuat partisipasi politik generasi muda di era digital melalui penyampaian kritik yang sopan, berbasis data, dan berlandaskan nilai-nilai konstitusi.

Sebagai calon pendidik, mahasiswa FKIP memaknai fenomena ini sebagai tantangan moral untuk memperbaiki kondisi sosial melalui jalur pendidikan. Mereka menyadari bahwa pendidikan merupakan instrumen strategis dalam mengatasi ketimpangan pengetahuan, membangun karakter demokratis, menumbuhkan integritas moral, serta memperkuat kesadaran berkonstitusi di masyarakat. Mereka memahami bahwa pendidikan merupakan sarana utama dalam menanggulangi “kegelapan” sosial, baik dalam bentuk ketimpangan pengetahuan maupun degradasi moral. Oleh karena itu, istilah “Indonesia Gelap” tidak dimaknai secara pesimistis, tetapi sebagai panggilan moral untuk menyalakan kembali nilai-nilai keadilan,

transparansi, dan demokrasi melalui peran aktif mahasiswa dalam ruang akademik, sosial, maupun politik kebangsaan.

REFERENSI

- Anggraeni, N. 2025. "PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA". (Doctoral dissertation, Universitas Ivet).
- Ardiyanto, E., & Melisa, R. 2025. *Analisis strategi komunikasi politik mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap 2025*. Jurnal Heritage, 6(1) 45-62.
- Fabela, Z. 2024. *Dampak kesenjangan sosial di Indonesia*. Senti Journal.
- Fadli, A., & Astuti, N. 2021. *Aktivisme mahasiswa dan kesadaran kritis di perguruan tinggi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 10(3) 215-228.
- Juditha, C. 2025. *Fenomena "Indonesia gelap" di media sosial: Analisis sentimen dan polarisasi opini publik*. Jurnal Komunikasi, 17(1) 158-163.
- Makmur, A. 2024. "Tantangan hukum dalam mengatasi kesenjangan sosial". Jurnal HAM dan Demokrasi.
- Moderasi. 2025. *Studi kritik terhadap narasi Indonesia Gelap*. Moderasi Journal, 6(1) 36-51.
- Murtadho, A. M. 2024. "Pergeseran pemahaman konstitusionalisme dalam ketatanegaraan Indonesia". Jurnal Hukum Tata Negara, 3(2).
- Raharjo, S., & Santoso, B. 2023. "Studi deskriptif tentang partisipasi politik mahasiswa dalam era digital". Jurnal Civic Education, 12(1) 50-63.
- Rasya, H. S., & Triadi, I. 2024. "Akses keadilan dan kesenjangan sosial: Transformasi melalui peran hukum tata negara". Law and Justice Journal.
- Sihotang, H. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif*. UKI Press.
- Sugiyono. 2022. "Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta.